



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA

TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kepada:

Yth. Penjabat Walikota Salatiga;

Ykh. Jajaran Forkompinda Kota Salatiga;

Ykh. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota salatiga;

Ykh. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;

Ykh. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;

Ykh. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;

Ykh. Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Ykh. Para Hadirin dan Tamu Undangan yang Berbahagia.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH



SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

Ungkapan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya, sehingga sampai saat ini masih berkesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Salatiga dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022.

Sebelum menyampaikan pandangan umum kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan Selamat atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan raihan untuk ketujuh kalinya. Semoga opini WTP ini menjadi pemicu perbaikan pengelolaan pemerintahan kedepan menjadi semakin baik lagi.

Sidang paripurna DPRD yang kami hormati

Mencermati Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Salatiga yang sudah disampaikan oleh saudara Walikota, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Salatiga memahami bahwa Laporan Keuangan yang meliputi: Realisasi pelaksanaan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, telah disusun secara baik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

kami FPKS DPRD Kota Salatiga menyikapi beberapa hal berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp905.568.012.938,00 (Sembilan Ratus Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dapat terealisasi sebesar Rp918.353.779.916,00 (Sembilan Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah).

Kami mengapresiasi bahwa Pendapatan Daerah lebih dari target sebesar Rp12.785.766.978,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau terealisasi sebesar 101,41% dari yang dianggarkan.

2. Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp142.431.115.304,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).

Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.213.423.946,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Saldo Anggara Lebih Agar bisa ditekan di tahun-tahun yang akan datang dengan perencanaan yang baik serta dalam pelaksanaan kegiatan dikerjakan di awal tahun.

3. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik Pemerintah Daerah bisa menganggarkan beasiswa pendidikan bagi guru-guru berprestasi sehingga memantik semangat untuk terus meng-upgrade diri.

Selain peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat pula untuk pelatihan wirausaha / enterpreneur, pendampingan UMKM, bantuan permodalan atau alat-alat, pengembangan bakat dan olah raga juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah.

4. Terkait dengan permasalahan perumahan sub inti agar segera di selesaikan dengan tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

5. Rumah Sakit dalam hal pelayanan non medis, mohon segera dilengkapi dengan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sehingga dapat digunakan sebagai pedoman teknis bagi seluruh pihak.

6. Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan tata kelola ulang, serta perlu adanya audit internal yang mengawasi kinerja BUMD agar lebih efektif dan akuntabel. Kami melihat bahwa nilai investasi yang digulirkan belum berbanding atas pendapatan yang diterima, walaupun bisa dipahami bahwa BUMD yang ada tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial saja namun kami berharap BUMD kita disamping sehat dalam laporan keuangan juga sehat secara hitungan bisnis sehingga ke depan bisa mandiri.

7. Pasar yang ada di Kota Salatiga mohon agar dioptimalkan pemanfaatannya. Pasar dibangun bagus tetapi tidak dilakukan upaya untuk meramaikan pasar yang sudah jadi seperti pasar Rejosari, Pasar Sayangan, pasar andong maupun pasar Krenceng.

Pembangunan Pasar Rakyat masih banyak yang belum difungsikan dengan maksimal. Kami meminta Dinas Pasar untuk terus berupaya mensosialisasikan ke masyarakat jangan dibiarkan begitu saja sehingga terkesan mangkrak.

Misalnya Disperindag bisa bekerjasama dengan OPD lain dalam pelaksanaan pasar rakyat atau bazaar UMKM yang lebih tepat, bisa dilakukan di pasar rejosari atau pasar krenceng, tidak dilakukan di ruang publik seperti selasar kartini sehingga tidak mengganggu hak pengguna jalan dan sarana umum yang dibangun tidak untuk pasar tetapi berubah menjadi pasar.

Sidang paripurna DPRD yang kami hormati

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Apabila dalam penyampaian pandangan umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu menyimak dan mendengarkan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.